

EVALUASI PENGENDALIAN DAN OPERASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN PADA TAHUN 2022 - 2023 DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Rabbil Erfan

Email : rabbil.erfan3672@student.unri.ac.id

Dosen Pembimbing : Hazqon Fuadi Nasution, S.IP., M.IP.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam menanggulangi kebakaran dan melindungi masyarakat dari risiko kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam pengendalian dan operasi DPKP pada periode 2022-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer melalui wawancara dengan petugas DPKP dan masyarakat, serta data sekunder dari laporan tahunan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPKP telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, masih terdapat berbagai kendala. Dari aspek efektivitas dan responsivitas, keterbatasan personel dan sarana menyebabkan keterlambatan respons, sementara edukasi kebakaran masih minim. Dari segi efisiensi, alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada pemadaman dibandingkan pencegahan, yang belum optimal. Jumlah pos, kendaraan, dan petugas belum mencukupi, serta distribusi layanan belum merata, terutama di wilayah dengan akses sulit. Selain itu, ketepatan kebijakan dan prosedur masih perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan melalui koordinasi lintas instansi. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar DPKP meningkatkan jumlah pos pemadam, mengoptimalkan anggaran untuk pencegahan, memperluas program edukasi masyarakat, serta memperbaiki sistem koordinasi dengan instansi terkait. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan DPKP Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas layanannya dalam menanggulangi kebakaran serta mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Dinas Pemadam Kebakaran, Efektivitas, Responsivitas, Optimal.

**AN EVALUATION OF THE FIRE AND RESCUE DEPARTMENT'S CONTROL MEASURES
AND OPERATIONS IN ADDRESSING FIRES IN PEKANBARU CITY FOR THE PERIOD
2022–2023**

By : Rabbil Erfan

Email : rabbil.erfan3672@student.unri.ac.id

Supervisor: Hazqon Fuadi Nasution, S.IP., M.IP.

Department of Government Science

Faculty of Social and Political Sciences, Riau University

Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12.5 Sim. New Pekanbaru 28293

ABSTRACT

The Fire and Rescue Department (DPKP) of Pekanbaru City plays a crucial role in fire prevention and protecting the public from fire-related risks. This study aims to evaluate the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy in the implementation of DPKP's duties during the 2022–2023 period. The research employs a descriptive qualitative method with an evaluative approach, using primary data obtained through interviews with DPKP officers and community members, as well as secondary data from annual reports and relevant documents. The results indicate that although DPKP has performed its duties fairly well, several challenges remain. In terms of effectiveness and responsiveness, limitations in personnel and equipment have led to delayed response times, and fire safety education remains insufficient. Regarding efficiency, the budget allocation is still heavily focused on fire suppression rather than prevention, leading to suboptimal outcomes. In terms of adequacy, the number of fire stations, vehicles, and personnel does not yet meet ideal standards. Service distribution is also uneven, particularly in areas with limited accessibility. Furthermore, the accuracy of policies and procedures still requires alignment with field conditions through better inter-agency coordination. Based on these findings, it is recommended that DPKP increase the number of fire stations, optimize budget allocation for prevention efforts, expand public education programs, and improve coordination systems with relevant agencies. These steps are expected to enhance the effectiveness and quality of DPKP's services in combating fires and mitigating their impact on the community.

Keywords: *Evaluation, Fire Department, Fire Incident, Effectiveness, Responsiveness, Optimal.*

PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam menangani kasus kebakaran sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran. Hal ini sama seperti tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia” (Aldari, 2022). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2020 pada Pasal 1 ayat 4, dijelaskan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran. Sementara itu, pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2020, menetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Pekanbaru. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Walikota nomor 158 Tahun 2021. Tugas pokok DPKP Kota Pekanbaru adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya.

Berdasarkan perwako nomor 158 tahun 2021, Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman Dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penanggulangan Bencana adalah pelaksana penanggulangan kebakaran. Sejalan dengan tugas pokok yang diatur dalam Peraturan Walikota, Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang “Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.” Dalam peraturan tersebut, pelayanan yang tercakup dalam sub urusan kebakaran dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pelayanan Utama, yang meliputi pemadaman dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban akibat kebakaran serta yang terdampak kebakaran, serta penyelamatan harta benda yang terkena kebakaran (harta benda langsung) dan harta benda yang terdampak kejadian kebakaran.

2. Pelayanan Penunjang, yang meliputi layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia selain kebakaran, seperti operasi darurat non kebakaran, penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban jatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, serta penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lainnya.

Menurut Rahmadhani (2021), upaya pemadaman kebakaran sering kali dilakukan secara kolaboratif oleh masyarakat menggunakan peralatan yang terbatas. Salah satu masalah yang kerap muncul dalam proses ini adalah kelalaian atas waktu hadir satuan pemadam kebakaran. Terkait dengan masalah tersebut, nyatanya salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan operasi pemadaman kebakaran adalah response time (waktu tanggap) pemadam kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan menyatakan bahwa

waktu tanggap instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi Indonesia tidak lebih dari 15 menit dengan rincian yaitu :

1. Waktu sejak diterima pemberitahuan kebakaran di suatu tempat, interpersasi penentuan Lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadam selama 5 menit. 2. Waktu tempuh atau perjalanan dari pos kebakaran menuju Lokasi kebakaran selama 5 menit. 3. Waktu gelar peralatan di Lokasi sampai dengan siap operasi pemadaman selama 5 menit.

Pada kenyataannya, satuan pemadam kebakaran sering kali tiba di lokasi kebakaran melebihi waktu tanggap (response time) yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Berdasarkan laporan dalam LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Tahun 2022, beberapa faktor yang menghambat kecepatan petugas pemadam kebakaran dalam mencapai lokasi antara lain adalah kemacetan lalu lintas, kesalahan dalam penyampaian informasi kebakaran, serta lokasi kejadian yang terletak jauh atau berada di area dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan petugas kesulitan untuk menjangkau lokasi kebakaran dan mengoptimalkan upaya pemadaman. Selain itu, keluhan dari masyarakat mengenai keterlambatan kedatangan petugas pemadam kebakaran dalam memulai operasi pemadaman juga masih sering terdengar, yang pada gilirannya memberikan kesan bahwa pelayanan yang diberikan kurang profesional.

Penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Inspektur Daerah Kota Pekanbaru. Hasil

evaluasi tersebut menunjukkan bahwa DPKP Kota Pekanbaru telah mengimplementasikan AKIP dengan sangat baik, yang tercermin dalam pemanfaatan sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Meskipun demikian, evaluasi tersebut juga mengindikasikan perlunya perbaikan lebih lanjut serta peningkatan komitmen dalam pengelolaan manajemen kinerja, terutama pelaksanaan tugas dalam menanggulangi kebakaran. Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses kerja dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam suatu organisasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk tidak membuat semua ini keliru penulis membatasi rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Evaluasi Pengendalian dan Operasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2022-2023?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang menjadi sasaran penelitian ini, yaitu : Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Pengendalian Dan Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dalam Menanggulangi Kebakaran Pada Tahun 2022-2023 Di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang konkrit dengan data dan fakta yang ada di lapangan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yang disebut juga dengan metode kualitatif karena

data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang sangat luas. Metode kualitatif itu sendiri adalah metode yang mengungkapkan makna yang esensial, digunakannya latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung dimana peneliti sendiri merupakan dasar instrumen kunci. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat pada suatu obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena dan tipe penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki, dipermasalahkan dan menganalisis serta menghasilkan data berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pengendalian Dan Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dalam Menanggulangi Kebakaran Pada Tahun 2022-2023 Di Kota Pekanbaru.

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis bagaimana evaluasi pengendalian dan operasi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menanggulangi kebakaran pada tahun 2022-2023 di Kota Pekanbaru. Evaluasi dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan, salah satunya menurut William N Dunn. Berdasarkan hasil analisis evaluasi pengendalian dan operasi DPKP Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran dapat dilihat dari enam faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan suatu evaluasi kebijakan dan menjadi kriteria penting dalam menemukan bagaimana evaluasi suatu kebijakan yaitu :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan

4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Hal ini sehubungan dengan tujuan evaluasi pengendalian dan operasi DPKP dalam menanggulangi kebakaran di Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan penelitian mengenai pengendalian dan operasi DPKP Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran dapat dilihat dari beberapa indikator berikut,

1. Efektivitas

Dalam konteks pelaksanaan tugas oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan lembaga dalam menjalankan fungsinya. Pengukuran efektivitas ini dapat dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain kecepatan respons terhadap laporan kebakaran yang masuk, jumlah kasus kebakaran yang berhasil ditanggulangi secara optimal, serta kesiapan dan ketersediaan sumber daya yang meliputi personel, peralatan, dan infrastruktur pendukung. Selain itu efektivitas juga dapat dinilai dari tingkat keberhasilan dalam mengurangi dampak kebakaran, baik dari sisi kerugian material maupun jumlah korban jiwa. Keempat aspek tersebut menjadi tolak ukur dalam menentukan sejauh mana DPKP mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam melindungi masyarakat dan aset-aset kota dari bahaya kebakaran.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian hasil yang optimal. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan respons di beberapa lokasi, yang disebabkan oleh kondisi akses jalan yang sempit dan padat, sehingga menyulitkan mobil pemadam untuk tiba tepat waktu di lokasi kejadian. Selain itu, jumlah armada dan personel yang tersedia saat ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penanganan kebakaran

di kota yang terus berkembang pesat. Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kebakaran, yang menyebabkan banyaknya insiden yang seharusnya dapat dicegah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan kebakaran, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi. Pertama, penambahan armada pemadam kebakaran menjadi hal yang mendesak guna mempercepat respons terhadap kejadian kebakaran, terutama di wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki risiko tinggi. Kedua, peningkatan kapasitas personel baik dari segi jumlah maupun keterampilan teknis perlu dilakukan agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, kampanye edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran juga sangat penting. Edukasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif dan mengurangi potensi terjadinya kebakaran akibat kelalaian atau kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam evaluasi kebijakan merujuk pada hubungan antara jumlah sumber daya yang digunakan dan hasil yang berhasil dicapai (Dunn, 2003). Dalam konteks tugas pemadaman kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, efisiensi dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal. Efisiensi ini dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dalam menangani insiden kebakaran, penggunaan anggaran dan sarana prasarana secara efektif dan tepat guna, serta perbandingan antara waktu dan biaya operasional dengan hasil akhir pemadaman yang dicapai. Selain itu, efisiensi juga

mencakup kelancaran dan kecepatan koordinasi antar lembaga terkait dalam proses penanganan kebakaran. Semakin efisien proses yang dijalankan, maka semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kebijakan dengan pengeluaran sumber daya yang minimal.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap indikator efisiensi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru disarankan untuk melakukan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, DPKP perlu menambah jumlah personel lapangan melalui mekanisme rekrutmen tenaga baru atau dengan melibatkan tenaga relawan yang diberikan pelatihan khusus. Kedua, alokasi anggaran yang lebih besar perlu diprioritaskan untuk pemeliharaan kendaraan operasional serta sarana dan prasarana pendukung, agar peralatan selalu dalam kondisi siap pakai. Ketiga, pembukaan pos pemadam kebakaran baru di titik-titik strategis dinilai penting untuk mengurangi waktu tempuh menuju lokasi kejadian, sehingga respons dapat dilakukan lebih cepat. Terakhir, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) ataupun instansi lainnya menjadi hal krusial untuk menciptakan sistem penanganan kebakaran yang lebih terintegrasi. Dengan peningkatan efisiensi tersebut, diharapkan kinerja DPKP Kota Pekanbaru dalam melindungi masyarakat dari risiko dan dampak kebakaran dapat berjalan secara lebih optimal.

3. Kecukupan

kecukupan (adequacy) dalam evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana hasil yang dicapai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau menyelesaikan permasalahan yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan tugas oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota

Pekanbaru, kecukupan dapat dijadikan tolak ukur penting dalam menilai sejauh mana kinerja lembaga telah menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kebakaran. Sebagai rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kecukupan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru disarankan untuk mengambil langkah-langkah strategis guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran. Pertama, DPKP perlu menambah jumlah personel serta meningkatkan pelatihan teknis bagi petugas pemadam, agar kapasitas sumber daya manusia dapat sejalan dengan beban kerja dan tantangan di lapangan. Kedua, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengadaan dan peremajaan sarana serta prasarana, sehingga seluruh unit operasional dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, pembangunan pos pemadam baru di wilayah yang belum terjangkau layanan juga menjadi prioritas, agar cakupan pelayanan DPKP semakin merata di seluruh kawasan Kota Pekanbaru. Terakhir, peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan simulasi kebakaran kepada masyarakat sangat penting dilakukan, sebagai bagian dari upaya preventif dan peningkatan kesadaran publik. Dengan peningkatan aspek kecukupan ini, diharapkan DPKP dapat menjalankan fungsinya secara lebih maksimal dalam melindungi masyarakat dari bahaya dan risiko kebakaran.

4. Perataan

Perataan (equity) dalam evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana manfaat dan beban dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam konteks pelayanan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, pemerataan menjadi indikator penting dalam

menilai keadilan akses terhadap perlindungan dari bahaya kebakaran. Beberapa aspek yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut antara lain distribusi layanan pemadam kebakaran ke seluruh kecamatan, termasuk daerah-daerah yang padat penduduk maupun yang secara geografis terpencil. Selain itu, pemerataan juga dapat dilihat dari akses yang setara terhadap fasilitas pemadam kebakaran, seperti pos pemadam, hidran, kendaraan, dan peralatan operasional. Ketersediaan layanan bagi masyarakat miskin serta wilayah dengan keterbatasan infrastruktur menjadi penanda lain dari keberhasilan kebijakan yang berorientasi pada keadilan. Tidak kalah penting, penyebaran kegiatan edukasi dan pelatihan pencegahan kebakaran secara merata di berbagai lapisan masyarakat turut mencerminkan sejauh mana prinsip pemerataan telah dijalankan dalam kebijakan dan operasional DPKP.

DPKP Kota Pekanbaru masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendistribusikan layanan secara adil, di antaranya: (1) distribusi pos pemadam kebakaran belum merata, terutama di kecamatan dengan luas wilayah besar seperti Kulim dan Rumbai Timur; (2) fasilitas seperti hidran dan kendaraan pemadam masih kurang, yang menghambat akses layanan ke beberapa wilayah; (3) masyarakat di daerah miskin dan terpencil memiliki akses terbatas terhadap layanan pemadam kebakaran, menyebabkan tingkat kerusakan akibat kebakaran lebih tinggi; serta (4) edukasi dan pelatihan pencegahan kebakaran masih terbatas, sehingga banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap risiko kebakaran.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam evaluasi pelaksanaan tugas mengacu pada sejauh mana program atau layanan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam konteks Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, responsivitas dapat dilihat dari kecepatan dan ketepatan dalam merespons laporan kebakaran, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan, serta kemampuan DPKP dalam menangani keluhan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Indikator ini mencerminkan kualitas interaksi antara penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

DPKP Kota Pekanbaru telah berupaya merespons kebutuhan masyarakat dengan cukup baik, tetapi masih menghadapi beberapa kendala utama, yaitu: (1) waktu respons terhadap laporan kebakaran masih lambat, dengan rata-rata kedatangan petugas lebih dari 10 menit; (2) tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan masih bervariasi, terutama terkait kecepatan respons dan ketersediaan fasilitas; (3) banyak masyarakat yang kesulitan menghubungi layanan darurat, menunjukkan perlunya peningkatan sistem komunikasi; serta (4) program adaptasi terhadap kondisi darurat masih terbatas, dengan aplikasi pelaporan kebakaran yang belum banyak diketahui masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan (*appropriateness*) dalam evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana kebijakan atau program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran layanan. Dalam konteks Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, ketepatan dapat dinilai melalui beberapa aspek, antara lain kesesuaian antara kebijakan serta prosedur operasional pemadaman dengan kondisi lapangan yang beragam, termasuk akses jalan dan karakteristik permukiman.

DPKP Kota Pekanbaru telah berupaya menyesuaikan kebijakan dan prosedurnya dengan kondisi di lapangan, tetapi masih menghadapi beberapa kendala utama, yaitu:

(1) beberapa aspek SOP pemadaman masih sulit diterapkan secara ideal, terutama di daerah dengan akses terbatas dan gedung bertingkat; (2) pengalokasian anggaran lebih fokus pada operasional pemadaman dibandingkan pencegahan, sehingga edukasi masyarakat masih kurang optimal; (3) strategi edukasi dan pencegahan kebakaran masih belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak warga yang belum memahami cara menghadapi kebakaran; (4) koordinasi dengan instansi lain masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi dan distribusi tugas saat terjadi kebakaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kebakaran selama tahun 2022–2023, yang dianalisis menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut (Dunn, 2003), diperoleh sejumlah temuan penting. Dari aspek efektivitas, pemadaman kebakaran telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan keterlambatan respons, yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel serta hambatan akses jalan ke lokasi kejadian. Dari sisi efisiensi, anggaran lebih banyak difokuskan pada operasional, tetapi pemanfaatannya masih belum optimal terutama dalam hal pemeliharaan sarana serta pelatihan sumber daya manusia. Sementara itu, pada indikator kecukupan, jumlah personel, kendaraan, dan pos pemadam yang tersedia masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh wilayah, khususnya kecamatan dengan luas wilayah yang besar. Selanjutnya, dalam hal pemerataan, layanan pemadam kebakaran belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah secara merata, dengan beberapa kecamatan masih memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pemadaman. Dari aspek responsivitas, meskipun petugas telah menjalankan tugas secara profesional,

masyarakat masih mengeluhkan keterlambatan respons serta minimnya edukasi terkait pencegahan kebakaran. Terakhir, pada indikator ketepatan, kebijakan dan strategi pemadaman yang diterapkan masih perlu penyesuaian dengan kondisi lapangan, terutama dalam aspek koordinasi lintas instansi dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, DPKP Kota Pekanbaru telah menunjukkan upaya maksimal dalam melaksanakan tugasnya, namun berbagai kendala tersebut perlu segera ditangani agar pelayanan kebakaran dapat berjalan secara lebih optimal, tepat sasaran, dan merata di seluruh wilayah kota.

SARAN

Evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2022 - 2023 sebagaimana simpulan diatas masih belum optimal terlaksana secara baik dan optimal, maka peneliti menyarankan : (1) Penambahan pos pemadam, untuk mempercepat waktu respons terhadap kebakaran, sangat penting bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru untuk membangun pos pemadam baru di kecamatan yang luas dan padat penduduk. Dengan adanya pos tambahan, diharapkan waktu tempuh menuju lokasi kebakaran dapat dipangkas, sehingga penanganan kebakaran dapat lebih cepat dan efektif. (2) Peningkatan sumber daya, peningkatan jumlah personel dan kendaraan pemadam kebakaran sangat diperlukan untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi kebakaran di berbagai wilayah. Penambahan sumber daya ini akan memperkuat kapasitas operasional DPKP dalam menangani insiden kebakaran yang lebih besar dan kompleks, serta memberikan respons yang lebih cepat terhadap laporan kebakaran. (3) Optimalisasi anggaran, agar efisiensi operasional lebih optimal, DPKP perlu meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana

dan prasarana yang ada, serta untuk pelatihan sumber daya manusia. Dengan alokasi anggaran yang lebih tepat, diharapkan pemeliharaan peralatan kebakaran dan peningkatan keterampilan petugas dapat dilakukan secara berkala dan menyeluruh. (4) Peningkatan edukasi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran, perlu diadakan lebih banyak sosialisasi dan pelatihan mengenai penggunaan alat pemadam api ringan (APAR). Melalui peningkatan edukasi ini, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi kebakaran secara mandiri, sehingga dapat mengurangi risiko kebakaran yang terjadi di lingkungan mereka. (5) Peningkatan koordinasi antarin instansi, memperkuat komunikasi dan koordinasi antara DPKP dengan instansi terkait seperti PLN, BPBD, dan kepolisian sangat penting untuk mempercepat proses pemadaman dan evakuasi pada saat terjadi kebakaran. Koordinasi yang baik antarin instansi akan memastikan respons yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat mempercepat penanganan kebakaran secara menyeluruh. (6) Pemanfaatan teknologi, untuk meningkatkan kecepatan respons dalam menangani kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru perlu mengembangkan aplikasi pelaporan kebakaran berbasis digital. Aplikasi ini akan mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejadian kebakaran secara real-time, sehingga petugas dapat segera merespons laporan tersebut dengan lebih cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanggulangan kebakaran di Kota Pekanbaru. Dengan penerapan langkah langkah ini, diharapkan pelayanan DPKP Kota Pekanbaru dapat lebih efektif, efisien, dan merata dalam menanggulangi kebakaran serta meningkatkan keselamatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA JURNAL

Adianto, Zidni Ma'romah. (2020), Pengembangan Kapasitas Pemadam Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Universitas Riau.

Aldari, Edra Faiz. (2022), Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Penanggulangan Kebakaran Bangunan Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Pekanbaru, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Noviar, Jamal, Muhlis. (2023), Peran Damkar Sebagai Upaya Pelayanan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Dinas Pemadm Kebakaran Di Kecamatan Longkali Kabupaten Paser, Samarinda, Universitas Terbuka Samarinda.

Radiansyah, Rifi Rivani. (2024), Kualitas Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Oleh Pos Damkar Wilayah Majalaya Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Bandung, Jurnal JISIPOL, Bandung, Universitas Bale Bandung.

Rahmadhani, Alhadi. (2021), Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran, Padang, Universitas Negeri Padang.

Ramdani, Rachmat. (2018), Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Karawang, Universitas Singaperbangsa.

Yazid, Muhammad Baariq. (2022), Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Dalam Menanggulangi Dan Pencegahan Kebakaran Bangunan Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Pekanbaru, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Ginanjari, Y., & Harikesa, IWA (2021). Pelaksanaan Program Sanitasi Australia Indonesia Hibah Infrastruktur Untuk Sanitasi/Saiig Di kota Cimahi Jawa Barat Pada Tahun 2020-2021. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 4 (2), 396-409
s
SKRIPSI

Hidayat, Rahmat. (2017), Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Kebakaran, Universitas Islam Riau.

Kurniasari, Anggun. (2021), Peran Upt Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Bencana Kota Magelang, Magelang, Universitas Tidar.

Tajuddin, rista. (2024), Kinerja Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Di Kota Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar

Widayanto, Prima. (2016), Analisis Kinerja Tim Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran Di Dinas Kebakaran Kota Semarang, Semarang, Universitas Negeri Semarang.

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020
Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Provinsi Dan Kabupaten

Peraturan Menteri Pekerja Umum
Nomor 20 Tahun 2009 Pedoman Teknis
Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
158 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan
Penyelamatan Kota Pekanbaru